

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Citra. 2011. Implementasi E-Government Melalui Bursa Kerja Online Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Skripsi. Universitas Indonesia.
- Anwar Prabu Mangkunegara. 2003. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama
- Babbie, E. 2004. *The Practice Of Social Research*. Belmont, CA: Wadsworth.
- Denhardt, Janet Valerie and Denhardt, Robert B., 2003. *The New Publik Service: Serving Not Steering*, ME Sharpe Inc., New York
- George Frederickson. 1997. *The Spirit of Public Administration*. Jossey-Bass Publisher. San Fransisco
- Hakikur Rahman. 2009. Framework of e-governance at the local government level. In Proceedings of the 3rd international conference on Theory and practice of electronic governance (ICEGOV '09). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 372–374.
- Harakan, Ahmad dan Ferawaty. 2020. “Collaborative Governance Dalam Menjalankan Sistem Keamanan Berbasis Closed Circuit Television (CCTV) Di Kota Makassar”. Gorontalo: *Journal of Public Administration Studies*. Volume 3 Nomor 1.
- Heriyanto. 2022. “Urgensi Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik”. *Musamus Journal of Public Administration*
- Indrajit, dkk. (2006). *Electronic Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi
- Indrajit, Richardus Eko (2002). *Membangun Aplikasi E-Government*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Indrajit, Richardus Eko. 2011. *Peranan Teknologi Informasi dan Internet*. Yogyakarta: Andi Offest.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan *E-Government*
- Kalsum, Ummu. 2019. Inovasi Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Closed Circuit Television (CCTV) Di Kota Makassar). Tesis. Universitas Hasanuddin

- Keban, Yeremias T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Lukman, Juwita Pratiwi. 2021. Efektivitas E-Government Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Paconne Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. Tesis. Universitas Hasanuddin
- M.R. Musa. 2010. An E-Readiness Assessment Tool For Local Authorities: A Pilot Application To Iraq. American University in Cairo
- Megawati, Lisa. 2020. Pengaruh Pemanfaatan E-Government Terhadap Disiplin Pegawai Di Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tana Toraja. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Muliawaty, L., & Henddrawan, S. 2020. “Peranan E-Gov dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang)”. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11 (2), 45-57
- Mulyadi, Deddy, Hendrik T. Gedeona dan Muhammad Nur Afandi. 2016. *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Nour, M.A., AbdelRahman, A.A., Fadlalla.A. 2007. “A context-based integrative framework for e-government initiatives”. *Government Information Quarterly* 25 (2008) 448 – 461
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Ridwan. 2004. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Aturan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019

LAMPIRAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar



Dinas Perhubungan Kota Makassar



Kepolisian Resor Kota Besar Makassar



Pengisian Kuesioner



No.	Pernyataan	STS	TS	K	S	SS
Akses Informasi						
1	Pemerintah memberi akses informasi CCTV Kota Makassar kepada masyarakat					
2	Pemerintah dapat memberikan dan memberitahukan informasi CCTV dengan jelas dan lengkap kepada masyarakat					
Transparansi						
1	Pemerintah telah memberikan informasi CCTV yang jelas dan terbuka bagi masyarakat					
2	Pemerintah tidak menutup-nutupi informasi CCTV tentang prosedur, biaya dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan pihak yang membutuhkan					
Akuntabilitas Publik						
1	Pemerintah telah bertanggungjawab atas apa yang telah diinformasikan bagi masyarakat dan pihak yang membutuhkan terkait informasi CCTV					
2	Pemerintah telah menjalankan tugasnya dengan baik untuk menyediakan informasi CCTV bagi masyarakat					
Integritas						
1	Pemerintah telah taat pada aturan dalam pelaksanaan sistem keamanan berbasis CCTV di					

	Kota Makassar					
2	Pemerintah telah bekerja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menambah maupun mengurangi fakta dalam pelaksanaan sistem keamanan berbasis CCTV di Kota Makassar					
3	Pemerintah menunjukkan antusiasme yang konsisten untuk selalu bekerja dalam pelaksanaan sistem keamanan berbasis CCTV di Kota Makassar					
4	Pemerintah memiliki dan menunjukkan komitmen untuk menjalankan sistem keamanan berbasis CCTV di Kota Makassar					
<i>Daya Tanggap Demokrasi</i>						
1	Pemerintah telah melayani masyarakat dan pihak yang membutuhkan dengan cepat terkait informasi CCTV					
2	Pemerintah telah melayani memberikan informasi CCTV dengan tepat dan mudah					
<i>Ketersediaan Layanan</i>						
1	Informasi CCTV dapat diberikan oleh masyarakat dan pihak yang membutuhkan oleh pemerintah ketika dibutuhkan					
2	Langkah atau prosedur dalam mendapatkan informasi CCTV dilakukan dengan mudah oleh masyarakat dan pihak yang membutuhkan					

<i>Efisiensi / Ekonomi</i>						
1	Pemerintah menggunakan sumber daya yang ada dalam pelaksanaan sistem keamanan CCTV Kota Makassar					
2	Pemerintah dengan mampu dengan cepat melakukan kegiatan dalam pelaksanaan sistem keamanan CCTV Kota Makassar					
<i>Efektivitas / Kualitas Pelayanan</i>						
1	Pemerintah telah memberikan pelayanan informasi CCTV yang cepat kepada masyarakat dan pihak yang membutuhkan					
2	Pemerintah telah memberikan pelayanan informasi CCTV yang mudah kepada masyarakat dan pihak yang membutuhkan					
3	Pemerintah telah memberikan pelayanan informasi CCTV dengan ramah kepada masyarakat dan pihak yang membutuhkan					
4	Kualitas informasi CCTV (visual / tampilan CCTV) yang diberikan kepada masyarakat dan pihak yang membutuhkan sudah baik dan terlihat jelas					
5	Pemerintah telah melaksanakan kegiatan pelaksanaan sistem keamanan berbasis CCTV Kota Makassar sesuai dengan prosedur					
6	Pemerintah telah melaksanakan kegiatan					

	pelaksanaan sistem keamanan berbasis CCTV Kota Makassar sesuai dengan kebutuhan masyarakat					
7	Kondisi sarana peralatan dan perlengkapan dalam sistem keamanan CCTV Kota Makassar baik dan layak serta dapat digunakan dengan baik					
8	Pelayanan sistem keamanan CCTV Kota Makassar merespon masalah / kebutuhan masyarakat secara tepat					
9	Respon pemerintah/petugas sistem keamanan CCTV kepada masyarakat dilakukan dengan baik apabila ada masalah keamanan yang terjadi					
10	Pelayanan sistem keamanan CCTV Kota Makassar (pemerintah dan petugas yang berwenang) memberikan perhatian yang baik pada masyarakat					
<i>Ekuitas</i>						
1	Sistem keamanan berbasis CCTV di Kota Makassar merupakan aset yang dapat menambah kekayaan entitas pada Pemerintah Kota Makassar					

JUMLAH DATA KENDARAAN POLDA SULAWESI SELATAN

NO	POLRES/TA	MP	BUS	MB	SPD MOTOR	RANSUS	TOTAL	%
1	KOTA MAKASAR	334.895	2.757	95.848	1.522.034	4.601	1.960.211	38,60
2	GOWA	33.737	90	13.111	288.452	917	336.314	6,62
3	BONE	20.959	295	11.774	267.006	1.004	301.045	5,93
4	PINRANG	17.042	72	7.536	209.786	1.086	235.540	4,64
5	WAJO	18.374	90	9.633	153.322	410	181.845	3,58
6	SIDENRENG RAPPANG	17.170	98	9.352	144.042	879	171.629	3,38
7	LUWU	10.566	64	4.134	149.293	472	164.530	3,24
8	MAROS	16.788	77	6.496	138.755	366	162.503	3,20
9	LUWU UTARA	7.905	53	5.418	141.772	532	155.683	3,07
10	LUWU TIMUR	12.535	441	7.792	131.960	530	153.260	3,02
11	KOTA PAREPARE	21.017	139	9.351	119.897	1.197	151.619	2,99
12	BULUKUMBA	13.228	25	8.585	123.389	516	145.790	2,87
13	KOTA PALOPO	10.903	84	3.803	120.174	442	135.425	2,67
14	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	11.279	60	5.649	115.888	235	133.127	2,62
15	TAKALAR	7.767	22	4.047	110.684	142	122.666	2,42
16	SOPPENG	7.480	86	3.728	74.046	282	85.627	1,69
17	JENEPONTO	7.208	22	4.596	63.544	328	75.736	1,49
18	BARRU	6.527	33	2.795	59.556	332	69.247	1,36
19	SINJAI	3.879	31	1.952	61.881	128	67.874	1,34
20	TORAJA UTARA	5.040	159	2.646	57.309	247	65.403	1,29
21	TANA TORAJA	4.076	143	3.750	53.535	231	61.736	1,22
22	ENREKANG	3.339	49	2.903	53.704	378	60.400	1,19
23	BANTAENG	4.054	34	2.617	37.221	221	44.148	0,87
24	SELAYAR	1.380	23	491	19.223	73	21.191	0,42
25	(TAK DIISI)	835	4	575	10.401	4	11.819	0,23
TOTAL		597.983	4.951	228.582	4.226.874	15.553	5.074.368	

Last update : 2023-10-22 22:19:23



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKP/ 31 /XVII.4.1/2023/Bag SDM

1. Rujukan
 - a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 26073/S.01/PTSP/2023, tanggal 18 September 2023, perihal izin penelitian.
 - b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/1679/IX/2023/Sium tanggal 25 September 2023, perihal izin penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : YUNIRA SYAILALHIKMA
Nomor Pokok : E012201016
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Alamat : JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM 10 MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

* ELECTRONIC GOVERNMENT DALAM SISTEM KEAMANAN BERBASIS CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DI KOTA MAKASSAR *

3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 20 November 2023

a.n. KAPOLRESTABES MAKASSAR POLDA SULSEL
KABAG SDM



Dr. H. MUHAMMADONG, S.E., M.M.
KOMISARIS POLISI NRP 70020236

Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fisip Unhas Makassar.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PERHUBUNGAN



Jl. Makassar No. 18, Mangrove, Tambora, Kota Makassar (Telp. ☎ 0411) 84834
Website : dishub.makassar.go.id

VIII/JURNALISTIK **SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/1213/DISHUB/X/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Makassar :

N a m a : **MUHAMMAD IRLAN RUSLAN, S.STP .,M.SI**
NIP : 19890107 201010 1 002
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III/d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Menunjuk Surat dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, Nomor 070/141/SKP/SB/DPMPSTP/8/2023 Tanggal 10 AGUSTUS 2023 Perihal PERMOHONAN IZIN PENELITIAN, maka dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **YUNIRA SYAILALHIKMA**
Nim : E012201016
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Instansi/Pekerjaan : MAHASISWA (S2)
Judul : **"ELECTRONIC GOVERNMENT DALAM SISTEM KEAMANAN BERBASIS CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DI KOTA MAKASSAR"**

Yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Makassar pada tanggal mulai tanggal **08 AGUSTUS s/d 29 SEPTEMBER 2023.**

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 20 OKTOBER 2023

Kepala Sub. Bagian UMUM & KEPEGAWAIAN,



MUHAMMAD IRLAN RUSLAN, S.STP ., M.SI

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19890107 201010 1 002

Tembusan :

1. Mahasiswa yang bersangkutan;
2. Arsip



Instagram: [humas_dishubmks](https://www.instagram.com/humas_dishubmks)



Email: dishubmksinfo@gmail.com

*Pilihlah Ke
Selama 'Ke*



Twitter : [Ppid_DishubMks](https://twitter.com/Ppid_DishubMks)
Facebook : [Humas Dishub Makassar](https://www.facebook.com/HumasDishubMakassar)



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan A. P. Pettarani No. 62 Makassar 90232 Telp. Fax. +62411 - 4671729

E-Mail : diskominfo@makassarkota.go.id Home Page : <https://diskominfo.makassarkota.go.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 800/5426 /DISKOM/XI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ISMAWATY NUR, ST., M.Sc., Ph.D**
NIP. : 19740607 200411 2 001
Pangkat/Gol. : Pembina / IV-a
Jabatan : Plt.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Makassar

Menerangkan bahwa :

Nama : **YUNIRA SYAILALHIKMA**
NIM : E012201016
Jurusan : Administrasi Publik
Pekerjaan : Mahasiswa (S2)

Adalah benar telah melaksanakan Penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar mulai tanggal 08 Agustus s.d 20 Oktober 2023 dengan Judul "**ELEDCTRONIC GOVERNMENT DALAM SISTEM KEAMANAN BERBASIS CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DI KOTA MAKASSAR**".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 27 November 2023



ISMAWATY NUR, ST., M.Sc., Ph.D
Pangkat : Pembina (IV/a)
Nip : 19740607 200411 2 001

Nama	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Akses Informasi		Transparansi		Akuntabilitas Publik		Integritas				Daya Tanggap Demokrasi		Ketersediaan Layanan		Efisiensi / Ekonomi		Efektivitas / Kualitas Pelayanan										Ekuitas
				X1.1	X1.2	X2.1	X2.2	X3.1	X3.2	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X5.1	X5.2	X6.1	X6.2	X7.1	X7.2	X8.1	X8.2	X8.3	X8.4	X8.5	X8.6	X8.7	X8.8	X8.9	X8.10	
AF	Wanita	S1		4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5
Wiwini Pratiwi	Wanita	SMA/Sederajat	Laskar Pelangi	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Muhtar Maulana Malik	Pria	S1	Honoror	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	
Haryati Amaliyah S	Wanita	S1	PNS	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	
Salim	Pria	S1	PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Drias	Pria	S1	PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Muh Iqbal Nursyam	Pria	S1	Honoror	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5
Sri Nur Rahmi	Wanita	S1	Honoror	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5
Maryam Amir	Wanita	S1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5
Salim	Pria	SMA/Sederajat		4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	1	5	4	4	1	5	1	5	5	5	4	4	4	4	4	5
Bagas	Pria	SMA/Sederajat		5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sandy Putra	Pria	SMA/Sederajat	Pegawai Swasta	1	1	1	3	5	1	2	1	2	1	3	1	4	2	1	2	4	1	3	5	1	3	3	3	3	3	3
Syanifuddin Ardiansyah	Pria	S1	Laskar Pelangi	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Restu Iman Bachtiar	Pria	SMA/Sederajat	Honoror	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	
Saiful Razaq	Pria	S1	Pegawai Kontrak	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5
Andi Jayanti Oktaviani	Wanita	S1	Tenaga Kontrak	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	
Ardiansyah	Pria	S1		5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5	
Andi Fahrudin	Pria	S1		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nur Surya Reski	Wanita	SMA/Sederajat	Tenaga Kontrak	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
Sri Wahyuni	Wanita	S1	Pegawai Kontrak	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fikri Haikal Wardhana K Mohd. Ghali	Pria	D4	Tenaga Kontrak	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5
Meyzha S. Bachmid	Pria	S1	Pegawai Non ASN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
Muh. Irfan	Pria	S1		5	4	4	3	4	5	5	4	5	5	4	3	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	3	3	4	4	3
Risva Lume	Wanita	S2	PNS	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Muh. Zakia Mardi	Pria	SMA/Sederajat		5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	
Rezky Andryanti	Wanita	S1	Honoror	4	4	4	4	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4
Arizal Kamal	Pria	SMA/Sederajat		5	5	4	5	5	4	3	4	3	4	5	5	5	5	4	3	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	5

Fahrian Attahariz	Pria	S1		3	5	3	4	5	5	4	4	4	5	3	3	3	3	5	5	3	3	3	4	5	5	3	4	4	3	5	
Reynaad	Pria	S1		3	5	3	4	5	5	4	4	4	5	3	3	3	3	5	5	3	3	3	4	5	5	3	4	4	3	5	
Ikram	Pria	S1	PNS	3	5	3	4	5	5	4	4	4	5	3	3	3	3	5	5	3	3	3	4	5	5	3	4	4	3	5	
Nuzul	Pria	S1	PNS	3	5	3	4	5	5	4	4	4	5	3	3	3	3	5	5	3	3	3	4	5	5	3	3	3	3	5	
Antonio	Pria	S1	Tenaga Kontrak	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	
Abdul Somad	Pria	S1	Tenaga Kontrak	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	
Tani	Pria	S1	Tenaga Kontrak	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	
M. Saing	Pria	S1	PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Arkan Basri	Pria	S1	PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	
Kaesar	Pria	S1	Tenaga Kontrak	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	
Afiq Fauzi Muh. Anugrah. K	Pria	S1	PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Moh. Anugrah. K	Pria	SMA/Sederajat	Tenaga Kontrak	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4
Yusuf Alfrida	Pria	S1	Tenaga Kontrak	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	
M. Sebastian Pratama	Pria	S1	PNS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Rustam Dani	Pria	S1	PNS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Adi Anwar	Pria	S1	Tenaga Kontrak	5	5	4	4	4	5	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	
Moch. Fahri Rahim	Pria	SMA/Sederajat		4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	
Syarifuddin Saleh	Pria	SMA/Sederajat	Tenaga Kontrak	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	
Risaldi Makmur	Pria	S1	Tenaga Kontrak	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Irmayasari	Wanita	SMA/Sederajat	Tenaga Kontrak	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Muhammad Riad	Pria	S1	Tenaga Kontrak	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	
Hamzah	Pria	S1	Tenaga Kontrak	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	
Zainuddin	Pria	S1	PNS	4	3	3	3	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	
Harun Al Jabber	Pria	S1	PNS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Alvin Nur	Pria	S1		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Muslimun	Pria	S1		4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Rahmat Yady	Pria	S1		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Sami UI Hasanah	Wanita	S1	Polisi	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	2	
Indah	Wanita	S1	Polisi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Andi Aidil Fitriah	Wanita	SMA/Sederajat	Polisi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Irfandi	Pria	S1	Polisi	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	

Kiki Nidya Pratiwi	Wanita	S1	Polisi	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5		
Fitria	Wanita	S1	PHL Polisi	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Eko Prasetyo	Pria	S1	Polisi	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Rahma	Wanita	S1	Polisi	5	5	5	1	1	4	5	5	5	5	2	2	2	2	3	5	4	4	4	2	5	5	5	5	5	5	5	4	
Kasman	Pria	S1	Polisi	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
M. Nur Awan	Pria	S1	Polisi	5	5	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Muhammad Isra Pratama	Pria	S1	Polisi	5	5	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Andi Al Kairu M	Pria	S1	Polisi	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	5	4	4	4	2	5	5	5	5	5	5	5	4	
Tenri	Wanita		Polisi	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	2	2	2	2	3	5	4	4	4	2	5	5	5	5	5	5	5	4	
Al Afgani Rakhman	Pria		Polisi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Sri Hartati	Wanita	D4	Honorer	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Rahmia	Wanita	SMA/Sederajat	Pegawai Swasta	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Rian Febrian	Pria	SMA/Sederajat	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Andi Musdalifah	Wanita	S1	Pegawai Swasta	4	3	2	2	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	
Hacay Wira Salma	Pria	SMA/Sederajat	Pegawai Swasta	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	3	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	
Rasya	Pria		Pelajar	3	4	3	4	5	3	3	5	4	5	5	4	3	4	4	5	4	3	5	4	2	4	4	2	3	3	5		
Ramli	Pria		PNS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5
Rusli	Pria	SMA/Sederajat	PNS	5	5	5	1	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4
Syahrudin	Pria	SMA/Sederajat	Satpol PP	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	1	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	
Irsan	Pria	SMA/Sederajat	Satpol PP	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Baho Lolo	Wanita	SMA/Sederajat		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Manindi Massalle	Pria	S1	PNS	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
Asma	Wanita	SMA/Sederajat	Wiraswasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	
Nur Ihwana P	Wanita	S1	Pelajar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	
Yoga Setiawan	Pria	S1	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	
Osep Wijaya	Pria	S1	PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Kahfi Batari	Pria	S1	Wiraswasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Syamsiah Astuty	Wanita	SMA/Sederajat	Wiraswasta	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	
Nurul Annisa	Wanita	S1	Wiraswasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Abdul Latif	Pria	S1	PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Ninwan Ahmad	Pria	S1	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

H. Jamaluddin	Pria	S1	PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3
Ajeng Ayu	Wanita	SMA/Sederajat		4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3
Astraf	Pria	SMA/Sederajat	Pelajar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Syamsul Bachri	Pria	SMA/Sederajat	Wiraswasta	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Diana	Wanita	SMA/Sederajat		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Sunarty	Wanita	SMA/Sederajat		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Aisyah	Wanita	SMA/Sederajat	Wiraswasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sulaiman	Pria	SMA/Sederajat		4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Lina	Wanita	SMA/Sederajat		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2
Hafied	Pria	SMA/Sederajat	Wiraswasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3
Wahyudi Nawid	Pria	S1	Pegawai Swasta	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	
Jupri	Pria	SMA/Sederajat	Wiraswasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
Deby Nurjannah	Wanita		Pegawai Swasta	2	3	2	3	4	3	3	3	2	2	4	4	4	1	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	2	3	2	
Rahmansyah	Pria		Pegawai Swasta	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	
Mawar Ninadin	Wanita		PNS	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	
Hadi Irawan	Pria		Pensiunan PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	
Yusika Agta Hadyk	Pria	S1	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	
Rahma Dwi	Wanita	SMA/Sederajat	PNS	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	
Febrian	Pria	S1	Wiraswasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	
Raihani Annisa	Wanita	S1	Pegawai Swasta	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
Reza Attaqi	Pria	S1	Wiraswasta	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4
Agus Gunawan	Pria		Wiraswasta	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	5		
Johandde	Pria		PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	5	
Ekki Mulyana	Wanita	S1	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	5	
Nurul Nasyiatul Aisyah	Wanita	S1	PNS	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	
Ramadhani Sudirman	Wanita	S1	Wiraswasta	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	
Yusuf Sitorus	Pria	S1	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	
Patta Saleh	Pria	SMA/Sederajat	PNS	2	2	2	2	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	2	3	4	2	3	3	4	4	4	
Haruddin	Pria	SMA/Sederajat		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Mauliza Tun	Wanita		Pegawai Swasta	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	

Angga Yudha	Pria		Pelajar	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4
Maing	Pria	SMA/Sederajat	Wiraswasta	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	5
Banri Gau	Pria	SMA/Sederajat	Wiraswasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Suhel Nehru	Pria	SMA/Sederajat		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Neti Maria	Wanita	S1	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	5
Endah	Pria	S1	Wiraswasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Prita Amalia	Wanita	S1		3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	5
Dadi Alwan	Pria	SMA/Sederajat	Pelajar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nirwan Ahmad	Pria	S1	Wiraswasta	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Widy Ningrum	Wanita	S1	PNS	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4
Didin Hermawan	Pria	SMA/Sederajat		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
Jumriati	Wanita	S1	PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4
Ika Hartati	Wanita	S1	PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4
Jumamuddin	Pria	SMA/Sederajat	Wiraswasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5
Hj. Dewi. B	Wanita	SMA/Sederajat	Wiraswasta	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4
Syamsiah	Wanita	SMA/Sederajat	Wiraswasta	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4
Awwalul Iyyanul	Pria	S1	Wiraswasta	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
Ening Halifah Bonto	Wanita	S1	PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
	Wanita	S1	Wiraswasta	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4



WALIKOTA MAKASSAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) PADA
BANGUNAN GEDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dan kewaspadaan terhadap segala bentuk kriminal terhadap masyarakat pada ruang publik melalui penyediaan akses pemantauan disekitar bangunan gedung, maka dipandang perlu adanya sinergitas antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan kewajiban pemasangan *closed circuit television* (CCTV) pada bangunan gedung dalam wilayah Kota Makassar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang penyediaan dan pemasangan *closed circuit television* (CCTV) pada bangunan gedung.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5088);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) PADA BANGUNAN GEDUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
6. Dinas Adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
7. Ruang Publik adalah ruang terbuka yang dapat diakses atau dimanfaatkan oleh warga kota secara cuma-cuma sebagai bentuk pelayanan publik dari Pemerintah Daerah demi keberlangsungan aktivitas.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Partisipatif adalah keterlibatan atau turut berperan serta dalam suatu kegiatan.
10. *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disingkat CCTV adalah perangkat teknologi berupa sistem kamera yaang dapat merekam lingkungan sekitar sesuai dengan spesifikasinya.
11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
12. Bagunan gedung fungsi hunian adalah bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, rumah kost dan rumah tinggal sementara.
13. Bangunan gedung fungsi keagamaan adalah meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan klenteng.
14. Bangunan gedung fungsi usaha adalah meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, pergudangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.
15. Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya adalah bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium dan pelayanan umum.
16. Bangunan gedung fungsi khusus adalah meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri.

17. Videotron adalah media periklanan besaryang biasa ditempatkan pada area yang sering dilalui, misalnya pada sisi persimpangan jalan dan/ atau menempel pada bangunan gedung yang mampu menampilkan teks, gambar atau video dan berbagai animasi dengan semua index warna secara elektronik.

BAB II **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi pemerintah Daerah untuk mewajibkan dan/atau mendorong pemilik/pengelola Bangunan Gedung untuk berpartisipasi dalam menyediakan dan memasang CCTV pada Bangunan Gedung dan pedoman bagi pemilik/pengelola Bangunan Gedung dalam penyediaan, pemasangan dan pengoperasian serta perawatan CCTV.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. Mengatur penyediaan akses pemantauan ruang publik dalam rangka perlindungan kepada masyarakat, mempermudah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di ruang publik sekitar area bangunan gedung; dan
- b. Mengintegrasikan sistem keamanan CCTV Bangunan Gedung dengan sistem informasi pemerintah Daerah sehingga dapat mengoptimalkan penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di ruang publik sekitar area bangunan gedung.

BAB III **RUANG LINGKUP**

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. Videotron;
- c. aspek teknis penyediaan perangkat;
- d. aspek teknis pemasangan perangkat;
- e. aspek teknis pengoprasian dan perawatan perangkat;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. pemberian sanksi.

BAB IV **BANGUNAN GEDUNG**

Pasal 5

- (1) Bangunan gedung meliputi :
 - a. Bangunan gedung dengan fungsi kegiatan usaha;
 - b. Bangunan gedung dengan fungsi hunian/tempat tinggal;
 - c. Bangunan gedung dengan fungsi kegiatan keagamaan;
 - d. Bangunan gedung dengan fungsi kegiatan sosial dan budaya; dan
 - e. Bangunan gedung dengan fungsi kegiatan khusus.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib menyediakan dan memasang CCTV yang terintegrasi dengan sistim informasi pemerintah Daerah.

- (3) Untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada huruf b, c, d dan e, bersifat sukarela dan partisipatif bagi pemilik/pengelola dalam menyediakan dan memasang CCTV pada bangunan gedung masing-masing.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari persyaratan untuk proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau izin-izin lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan adalah kewenangan Walikota.
- (5) Untuk proses pemberian izin sebagaimana di maksud pada ayat (4) harus terlebih dahulu mendapat kajian teknis dari dinas.

BAB V

VIDEOTRON

Pasal 6

- (1) Videotron meliputi :
 - a. Videotron yang berdiri ditepi jalan dan/ atau persimpangan;
 - b. Videotron yang berdiri melintang diatas jalan;dan
 - c. Videotron yang menempel pada bangunan gedung.
- (2) Videotron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c wajib menyediakan dan memasang CCTV yang terintegrasi dengan sistem informasi Pemerintah Daerah.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari persyaratan untuk proses pemberian izin reklame dan atau izin-izin lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan adalah kewenangan Walikota.
- (4) Untuk proses pemberian izin reklame sebagaimana di maksud pada ayat (3) harus terlebih dahulu mendapat kajian teknis dari Dinas terkait

BAB VI

ASPEK TEKNIS

Bagian Kesatu

Aspek Teknis penyediaan perangkat

Pasal 7

- (1) Pemilik/pengelola bangunan gedung dan pengelola Videotron wajib memasang CCTV dengan memenuhi aspek teknis penyediaan perangkat.
- (2) Aspek teknis penyediaan perangkat sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyediaan ruang pada bagian bangunan gedung videotron untuk pemasangan perangkat CCTV yang mengarah keruang publik;
 - b. Penyediaan CCTV beserta perangkat pendukungnya paling sedikit 2 (dua) perangkat yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/ atau standar internasional; dan
 - c. Penyediaan CCTV yang memiliki sistem perekaman terintergrasi.

Bagian kedua

Aspek Teknis Pemasangan Perangkat

Pasal 8

- (1) Pemilik / pengelola bangunan gedung dan pengelola Videotron wajib memasang CCTV dengan memenuhi aspek teknis pemasangan perangkat.
- (2) Teknis pemasangan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemasangan CCTV diarahkan meliputi area ruang publik;
 - b. Pemasangan CCTV harus memiliki atau berbasis IP yang dihubungkan dengan sistem yang ada di pemerintah Daerah; dan
 - c. Pemasangan CCTV harus di sertai dengan penyediaan akses jalur interkoneksi data yang terhubung dengan sistem jaringan dan informasi pemerintah Daerah.

Bagian ketiga

Aspek Teknis Pengoprasian dan perawatan perangkat

Pasal 9

- (1) Pemilik/ pengelola bangunan gedung dan pengelola Videotron wajib memasang CCTV dengan memenuhi aspek teknis pengoprasian dan perawatan perangkat.
- (2) Teknis pengoprasian dan perawatan perangkat sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perekaman CCTV yang mengarah ke ruang publik; dan
 - b. Perawatan perangkat CCTV secara berkala dan memastikan CCTV selalu berfungsi dengan baik.

BAB VII

MINITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban pelaksanaan CCTV pada bangunan gedung dan Videotron dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 dilakukan untuk menjamin bahwa CCTV yang terpasang dapat beroperasi dengan baik dan terkoneksi dengan sistem yang ada di pemerintah Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas secara berkala.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 di laporkan kepada Walikota secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 12

Selain monitoring dan evaluasi oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, masyarakat dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban pemasangan CCTV di bangunan gedung dan Videotron sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Pemilik/pengelola bangunan gedung dan pengelola Videotron yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) sampai dengan Pasal 9, dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Peringatan secara tertulis;
 - b. Pembekuan sementara kegiatan usaha;
 - c. Pencabutan izin/tanda daftar; dan/atau
 - d. Penutupan usaha.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan SKPD terkait.

Pasal 14

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dilakukan secara patut dengan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis, paling lama 3 kali 24 jam terhitung sejak diterimanya peringatan tertulis atau berita acara oleh pemilik/pengelola bangunan gedung dan pengelola Videotron.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan apabila pemilik/pengelola bangunan gedung belum melaksanakan kewajibannya sekalipun telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dikenakan apabila pemilik/pengelola bangunan gedung dan videotron, paling lama 7 (tujuh) hari kerja belum melaksanakan kewajibannya sekalipun telah di jatuhi sanksi pembekuan kegiatan usaha.
- (4) Penutupan kegiatan usaha sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, dikenakan apabila pemilik/pengelola bangunan gedung dan videotron, paling lama 14 (empat belas) hari kerja belum juga melakukan kewajibannya sekalipun telah di jatuhi sanksi pencabutan izin.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Bangunan gedung/videotron yang telah memiliki/memasang CCTV, sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, agar menyesuaikan dengan aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9, paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Walikota ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 30 Maret 2017

WALIKOTA MAKASSAR



MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal 30 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR



IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 4